

## Meneguhkan Pancasila sebagai Ideologi Bernegara Mahasiswa Prodi Teknik Industri Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Billy Jack Sony<sup>1</sup>, Ictiar Eka Setia Ramadhan<sup>2</sup>, Apriliano Alferezi Putra<sup>3</sup>, Sudirman Harefa<sup>4</sup>, Suyono<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

[suyono@unipasby.ac.id](mailto:suyono@unipasby.ac.id)<sup>5\*</sup>

Alamat: Jalan Dukuh Menanggal XII, Surabaya, Jawa Timur 60234

Korespondensi penulis: [suyono@unipasby.ac.id](mailto:suyono@unipasby.ac.id)

**Abstract.** *The values of Pancasila are important to be practiced in the life of society, nation and state by every citizen of Indonesia. Until now, strong religious values have become the moral foundation of the life of the Indonesia nation. Human nature is highly respected and placed according to nature as a Created Creature of God Almighty. With its plurality, the Indonesia nation has a very heterogeneous cultural wealth. In Indonesia, the subject of Pancasila Moral Education (PMP) was once known, then changed to Pancasila and Citizenship Education (PPKn), and is currently known as Civic Education (PKn) in schools. In Higher Education, it is known that there are Pancasila Education and Civic Education courses. The learning model of Pancasila education in schools and universities has significant differences. The development of awareness of national and state life based on Pancasila values needs to be built and continue to be internalized to all Indonesia citizens because the challenges faced today, both domestically and abroad, are getting higher. It is important to pay attention to aspects of the educational process for the younger generation in fostering awareness of the values contained in Pancasila that are embraced so that they are not forgotten.*

**Keywords:** *Pancasila Values, Civic Education, Learning Model*

**Abstrak.** Nilai-nilai Pancasila penting untuk diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh setiap warganegara Indonesia. Sampai saat ini nilai-nilai keagamaan yang kuat menjadi landasan moral kehidupan Bangsa Indonesia. Fitrah manusia sangat dihormati dan ditempatkan sesuai kodrat sebagai Mahluk Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat heterogen. Di Indonesia pernah dikenal mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP), kemudian diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), dan saat ini dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di persekolahan. Di Pendidikan Tinggi dikenal ada mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Model pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dan di perguruan tinggi memiliki perbedaan yang signifikan. Pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu dibangun dan terus diinternalisasikan kepada segenap warganegara Indonesia karena tantangan yang dihadapi sekarang, baik dari dalam negeri maupun luar negeri semakin tinggi. Penting diperhatikan aspek proses pendidikan bagi generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila yang dianut agar tidak dilupakan.

**Kata kunci:** Nilai-Nilai Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Model Pembelajaran

### 1. LATAR BELAKANG

Sejak pertengahan tahun 1998 sampai saat ini, sangat dirasakan bahwa pembahasan tentang Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan di Indonesia, sangat jarang dilakukan. Bahkan mungkin banyak yang merasa malu dan terganggu jika membicarakan Pancasila, karena khawatir dianggap dan di kelompokkan sebagai pendukung orde Baru. Pasca berakhirnya pemerintahan masa Orde Baru, sangat dirasakan bahwa pembahasan Pancasila mengalami kemerosotan yang signifikan, kata pancasila sekedar

dilafalkan pada upacara hari Senin di sekolah, peringatan hari besar RI, dan setahun sekali di awal bulan Juni, selebihnya Pancasila nyaris dilupakan orang.

Pancasila sebagai dasar Negara seharusnya dapat lebih dipahami oleh segenap rakyat Indonesia, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus di yakini sebagai dasar/pondasi bagi bangsa ini dalam segala penyelenggaraan ketatanegaraan. Lebih dari itu, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan ini sangat penting sebagai nilai yang perlu diamankan dan diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Anis Ibrahim (2010) menuliskan pada tahun 1998 di tengah kegandrungan reformasi yang sedang bergulir, bangsa Indonesia melalui MPR melakukan evaluasi dan menyimpulkan bahwa Penataran P4 telah gagal. Kemudian Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P4 dicabut melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara. Setelah terbitnya Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tersebut, untuk saat ini kedudukan Pancasila adalah sebagai asas/dasar negara. Hal ini jelas dan tegas termaktub dalam Pasal 1 Ketetapan MPR tersebut yang berbunyi sebagai berikut: “Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara” (Suhartono dkk., 2024).

Dalam perspektif ini, kini akan menjadi pembahasan dan diskusi menyangkut tindak lanjut implementasi Pancasila sebagai dasar Negara, setidaknya terungkap dalam pertanyaan, bagaimana bangsa Indonesia harus melaksanakan Pancasila secara konsisten padahal tidak ada penjelasan konsepsional maupun yuridis konstitusionalnya?. Tidak adanya konsep yang menjadi pedoman dalam memahami dan melaksanakan Pancasila, baik sebagai dasar negara maupun sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bermasyarakat Indonesia dapat menimbulkan kerumitan. Apakah hanya dengan menegaskan Pancasila sebagai dasar negara melalui sebuah Ketetapan MPR berarti Pancasila akan mampu menjadi pedoman menyelesaikan persoalan negara, bangsa, dan kemasyarakatan?. Jawabannya pasti tidak demikian. Selayaknya hal ini menjadi tantangan bagi kita semua untuk mampu memberikan rumusan konsepsional dan bahkan operasional yang sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila sebagai dasar negara (Firdaus & Ahadah, 2022).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk identitas dan arah pembangunan bangsa. Sebagai ideologi, Pancasila mencerminkan nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat Indonesia, yakni Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan. Pancasila pertama kali dicetuskan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, kemudian dirumuskan resmi sebagai dasar negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman etis tetapi juga menjadi dasar filosofis bagi penyusunan berbagai kebijakan dan regulasi di Indonesia (Widyatama, 2023).

Secara teoritis, Pancasila sebagai ideologi negara bersifat inklusif dan terbuka, memungkinkan adaptasi dan relevansi dengan perkembangan zaman. Sebagai ideologi, Pancasila mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa yang ada di Indonesia, menjadikannya alat pemersatu yang efektif dalam menjaga keutuhan NKRI. Dengan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa, Pancasila menghormati terhadap agama dan kepercayaan, sedangkan sila-sila lain menekankan pentingnya kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial (Zaman dkk., 2023).

Penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga tercermin dalam kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Prinsip-prinsip Pancasila dijadikan dasar dalam perumusan undang-undang, program pembangunan, dan sistem pendidikan nasional. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan normatif tetapi juga operasional dalam kehidupan berbangsa. Namun, tantangan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila tetap ada, seperti isu-isu, ketimpangan sosial, dan korupsi (Rafiki & Dewi, 2022)

## **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggali dan memahami fenomena berdasarkan perspektif partisipan dalam konteks alaminya. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, dengan tujuan untuk menggambarkan situasi atau fenomena secara rinci dan komprehensif. Teknik purposive sampling sering digunakan untuk memilih partisipan yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui proses coding dan kategorisasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data.

Proses analisis dalam penelitian kualitatif deskriptif melibatkan pendekatan induktif, di mana peneliti berusaha untuk membangun pemahaman berdasarkan data yang diperoleh, tanpa memaksakan kerangka teori yang ada sebelumnya. Validitas dan reliabilitas data dijaga melalui triangulasi, member checking, dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber atau menggunakan berbagai metode, sementara member checking melibatkan partisipan dalam memverifikasi temuan. Audit trail menjaga transparansi proses penelitian dengan mendokumentasikan langkah-langkah dan keputusan yang diambil selama penelitian. Hasil akhir dari penelitian kualitatif deskriptif adalah gambaran rinci mengenai fenomena yang diteliti, yang dapat memberikan wawasan dan dasar penelitian atau pengembangan kebijakan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kedudukan Dan Posisi Pancasila Sebagai Ideologi Negara**

Kedudukan dan posisi Pancasila, bagi Negara Republik Indonesia merupakan Dasar Negara, ideologi, pandangan dan falsafah hidup berbangsa. Hal ini menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan cita-cita yang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kebenaran nilai-nilai Pancasila yang diyakini selama ini, merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal, serta tidak akan berubah sesuai dengan dinamika jaman (Muhtarom, 2010; Widisuseno, 2014).

Sampai saat ini kehidupan Bangsa Indonesia diwarnai nilai-nilai keagamaan yang kuat sebagai landasan moral, dan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai dengan keragaman budaya yang dimiliki. Fitrah manusia sangat dihormati dan ditempatkan sebagai Mahluk Ciptaan Tuhan YME. Dengan kemajemukan yang dimiliki, bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat heterogen. Winataputra (2012) mengemukakan nilai-nilai dalam Pancasila selayaknya menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau mengemukakan bahwa sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa, memuat pengakuan eksplisit akan eksistensi Tuhan sebagai sumber Pencipta sekaligus memperlihatkan relasi esensial antara yang mencipta dan dicipta. Dalam hubungan dan relasi sosial, terbangun untuk saling menghormati dan mau bekerja sama antar pemeluk agama dan kepercayaan, serta kebebasan memeluk agama, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki makna bahwa sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang sopan dan susila nilai. Dengan demikian setiap manusia dan warga Indonesia selayaknya mengakui atas persamaan hak dan kewajiban,

saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, merupakan perwujudan dari kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan Beradab. Sila Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, berarti bahwa warga Negara Indonesia diharapkan aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan-keputusan. Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung arti keadilan berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan baik materi maupun spiritual.

Muladi (2006) berpandangan bahwa dalam kehidupan suatu negara, apa yang dinamakan proklamasi kemerdekaan (declaration of independence), pembukaan UUD, ideologi dan konstitusi secara komplementer selalu merupakan “cornerstones” dalam mengendalikan kehidupan bernegara. Pancasila secara utuh harus dilihat sebagai suatu “national guidelines”, sebagai “national standard, norm and principles” yang sekaligus memuat “human rights and human responsibilities”. Apabila Pancasila disepakati sebagai Ideologi Negara, maka Alfian (1981), mengemukakan sebagai ideologi harus dilihat sebagai sistem nilai yang menyeluruh tentang kebenaran dan keadilan dalam kehidupan bersama di masyarakat. Ideologi mencerminkan tatanan nilai yang paling mendasar dari sistem nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, ideologi merupakan referensi dari perkembangan nilai di Indonesia.

Pada selanjutnya Alfian (1981) merumuskan dimensi ideologi yaitu: 1) dimensi realitas, 2) dimensi idealis, 3) dimensi fleksibel. Dalam pemahaman Alfian, ideologi harus memiliki ketiga dimensi tersebut. Ideologi memiliki cakupan yang komprehensif, yaitu memayungi berbagai kepentingan dan dinamika sosial karena Ideologi merupakan himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, dan kepercayaan dari seseorang atau kelompok orang. Jadi ideologi merupakan referensi bagi seseorang atau kelompok dalam merespons masalah dan dalam bersikap (Miriam Budiardjo, 2008) .

Selain sebagai Ideologi, Pancasila sebagai falsafah Negara Indonesia. Pancasila menganut asas ke selarasan dan kesetaraan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi dan dalam hubungan manusia dengan masyarakat. Apabila menyimak Sila Kelima Pancasila tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Notonagoro (1995) dalam Arvie Johan (2011) berpendapat di dalam keadilan sosial tercakup pemeliharaan kepentingan umum negara se-bagai negara, kepentingan umum para warga negara bersama, kepentingan bersama dan kepentingan khusus dari warga negara perseorangan, keluarga, suku bangsa dan setiap golongan warga Negara.

Dalam perspektif ini, dapat dikaji bahwa Pancasila sebagai Ideologi berbeda dengan filsafat. Pancasila sebagai Ideologi memang mengandung nilai-nilai dan pengetahuan filosofis, namun berlaku sebagai keyakinan normatif. Sebaliknya Pancasila sebagai filsafat merupakan rangkaian pengetahuan ilmiah yang disusun secara sistematis tentang kenyataan-kenyataan hidup, termasuk kenyataan hidup bermasyarakat dan bernegara. Dalam pandangan filsafat, pemikiran-pemikiran reflektif yang harus ditanggapi bukan dengan dogmatis, dan memerlukan sikap yang kritis rasional. Oleh karena itu, Pancasila sebagai falsafah Negara harus selalu terbuka terhadap kritikan dan tidak bersifat eksklusif.

Berdasarkan hal demikian, filsafat sangat berguna bagi ideologi dan proses penjabaran ideologis. Melalui pendekatan filosofis dikaji secara mendasar hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, bangsa, dan negara. Refleksi filosofis membuat Pancasila sebagai Negara tetap terbuka, tidak eksklusif, dan totaliter, bahkan sebaliknya menjadi dinamis dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan melalui interpretasinya yang objektif, rasional, dan ilmiah. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi Negara menjadi relevan. (Poespowardojo, 1992). Hakikat Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa, dasar negara dan tujuan negara yang mengandung nilai-nilai luhur, nilai dasar, nilai praktis, nilai instrumental dan nilai teknik. Hal ini kemudian tertuang dalam falsafah Pancasila dalam bentuk lima sila yang saat ini kita kenal. Secara historis, Pancasila merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia terutama dimasa sebelum kemerdekaan yang kemudian dirumuskan sebagai dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam pemahaman demikian, maka Pandangan tentang Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni: 1) kelompok material, yaitu Pancasila merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia yang dapat dihayati sebagai jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sarana tujuan hidup bangsa, pandangan serta pedoman hidup bangsa; dan 2) kelompok formal, yakni Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia dan juga perjanjian luhur bangsa Indonesia dalam bernegara (Noor Ms Bakry, 1994).

Dalam perspektif menempatkan Pancasila sebagai Ideologi Negara, maka dapat dilihat dalam kawasan filsafat ilmu baik dari segi ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Secara ontologis, hakikat ilmu pengetahuan merupakan aktivitas manusia Indonesia yang tidak mengenal titik henti dalam upayanya mencari dan menemukan kebenaran dan kenyataan yang utuh dalam dimensinya sebagai masyarakat, sebagai proses, dan sebagai produk. Secara epistemologis, berarti Pancasila dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dijadikan metode berpikir (dijadikan dan arah berpikir) dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, yang parameternya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Secara aksiologis,

kemanfaatan dan efek pengembangan ilmu pengetahuan tidak bertentangan dengan ideal Pancasila dan positif mendukung atau mewujudkan nilai-nilai ideal Pancasila. Hal inilah yang kemudian menjadi landasan penting perumusan formulasi Pancasila dijadikan sebagai salah satu bagian kurikulum pendidikan di Indonesia pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

Nilai-nilai luhur, historik dan sebagainya yang terkandung di dalam Pancasila harus ditransfer secara terus menerus dari generasi ke generasi, sebab di dalamnya terkandung falsafah bangsa, aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pandangan Harian Kompas, perlu langkah menjadikan bidang pendidikan dan kebudayaan sebagai bidang yang mesti dimaksimalkan dalam mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga akan tercipta pribadi-pribadi dan masyarakat pancasila. Dalam dimensi ini gagasan harian Kompas menunjukkan komprehensifitasnya dalam menggagas upaya-upaya mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. (Wahyudi, 2011).

Pada Sistem Pendidikan Indonesia, pernah dikenal pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) kemudian diganti menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sampai akhirnya saat ini dikenal dengan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di persekolahan. Sedangkan di Pendidikan Tinggi dikenal ada mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Model pembelajaran pendidikan Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa tentunya memiliki perbedaan yang signifikan.

### **Strategi Internalisasi Dan Pembudayaan Pancasila**

Sebagai sistem nilai bangsa Indonesia, sebagai pedoman bermoral, ber hukum dan berpolitik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Dasar Negara, Pancasila merupakan ideologi, pandangan dan falsafah hidup yang harus dipedomani bangsa Indonesia dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa dan memiliki nilai dasar yang diakui secara universal dan tidak akan berubah oleh perjalanan waktu. (Budi Susilo Supandji, 2013). Setiardja (2006) dalam Ahmad Gunawan dan Mu' ammar Ramadhan (ed) (2006) mengemukakan bahwa lima prinsip Nilai Pancasila menunjukkan ide-ide fundamen-tal mengenai manusia dan realitas, yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia dan bersumber pada watak dan kebudayaan bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai suatu sistem nilai yang digali dari nilai dan identitas bangsa yang berdasarkan atas kehidupan sosial, kultural, dan religiusitas yang beragam dan majemuk. Nilai-

nilai tersebut tidak dipisah-pisahkan. Kerukunan umat beragama, keberagaman etnisitas, budaya dan bahasa akan terjaga apabila kita dapat menjaga konsistensi dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila. Fakta kemajemukan dan multikultural dalam masyarakat harus dihormati, dilestarikan, dan dikembangkan (Aris Shofa, 2016). Oleh karena itu, saat ini sangat diperlukan penyegaran pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstremisme. Dengan menguatkan nilai-nilai ketuhanan berkebudayaan, kebangsaan yang berperikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi keadilan sosial, Indonesia akan mampu menghadapi perkembangan baru dengan visi global yang berkearifan lokal. (Yudi Latif, 2011). Tinggal masalahnya, bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan ke saling terkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. (Yudi Latif, 2011)

Pengembangan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila perlu dibangun dan diinternalisasikan kepada segenap warganegara Indonesia karena tantangan yang dihadapi sekarang, baik dari dalam negeri mau-pun luar negeri semakin tinggi. Dalam pandangan saya, diperhatikan aspek proses pendidikan bagi generasi muda dalam menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila yang dianut agar tidak dilupakan. Saat ini dan ke depan memungkinkan manusia berhubungan dan berkomunikasi setiap saat tanpa batas. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan kontribusi positif bagi proses pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pada sisi lainnya, teknologi informasi digunakan sebagai sarana melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan. (Mahpudz, 2013).

Dalam konteks, maka upaya sistem dan sistematis melalui pendidikan merupakan langkah strategis untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila bagi segenap warga Negara Indonesia di era sekarang. Nilai-nilai Pancasila sebaiknya dijabarkan dalam bentuk contoh-contoh perilaku yang dapat diamati dalam kehidupan yang realitas masyarakat. Bagi generasi muda yang saat ini menjadi siswa di tingkat pendidikan dasar dan pendidikan menengah, selayaknya nilai-nilai Pancasila dapat disajikan dalam wujud yang meyakinkan serta konkret dalam bentuk kasus atau isu yang dapat dianalisis sebagai ideologi Negara dan memiliki nilai-nilai luhur bangsa sehingga mampu menjadi bekal yang tangguh bagi segenap warga Negara Indonesia dalam menghadapi setiap ancaman dan gangguan yang dapat membahayakan keamanan dan kelangsungan, hidup bangsa, tanpa mengenal menyerah. (Mahpudz, 2013).

Pada tataran operasional, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, organisasi

politik, organisasi masyarakat, dosen dan guru adalah pelaksana dalam upaya revitalisasi nilai Pancasila yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan pembekalan yang memadai terkait nilai-nilai Pancasila, komponen bangsa tersebut memainkan peran sebagai agen perubahan (*agent of change*) mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman hingga lingkungan kerja. Pendidikan formal, informal maupun non formal yang dimulai dari lingkungan keluarga hingga lingkungan pendidikan, merupakan sarana yang efektif untuk menanamkan pemahaman atas nilai-nilai empat pilar wawasan kebangsaan. (Soepandji, 2013). Selanjutnya mengemukakan bahwa sebagai rangkaian upaya yang terstruktur, upaya pada tataran operasional akan bersifat praktis implementatif. Pelibatan lembaga tersebut untuk menghasilkan peraturan perundangan yang memperkuat upaya-upaya revitalisasi Pancasila secara demokratis dan bermartabat. Upaya yang bersifat praktis ditujukan untuk mendukung upaya-upaya politis melalui kegiatan-kegiatan seperti pendidikan, penyuluhan dan *training of trainer* (TOT) tenaga penyuluh dengan melibatkan peran aktif para pemangku kepentingan. Sedangkan upaya yang bersifat operasional dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Hal ini dilakukan mengingat lembaga pendidikan merupakan ujung tombak pembentukan watak dan karakter bangsa, khususnya generasi muda.

Proses pendidikan perlu diintegrasikan pula dengan upaya penanaman nilai-nilai Pancasila di samping pengembangan pengetahuan secara akademis. Proses pendidikan pada masa depan selayaknya dibangun atas dasar kebutuhan belajar peserta di memiliki dasar kemampuan untuk menjalani kehidupan di masyarakat pada masa kini dan masa depannya. (Mahpudz, 2013). Oleh karena itu, perolehan pendidikan dari internalisasi nilai Pancasila yang didapat peserta didik selayaknya berupa kemampuan yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam kehidupan sosialnya. Kemampuan beradaptasi semakin dibutuhkan pada kehidupan sosial dengan kemampuan yang dimiliki dalam ilmu pengetahuan dan kematangan afeksi secara keseluruhan dengan didasari nilai-nilai Pancasila. Kemampuan untuk mudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang terus berubah fluktuatif ini akan menjadi tuntutan dari pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

### **Perwujudan Nilai-Nilai Pancasila**

Sekaitan dengan pemikiran ini, dipaparkan oleh Winataputra (2012) bahwa untuk mewujudkan pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam arti utuh dan luas, maka untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah nama mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan disesuaikan menjadi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang secara utuh memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai nilai Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada aspek pembinaan nilai-nilai kepribadian, yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila akan berkaitan dengan komitmen seseorang, individu sebagai bagian dari seluruh bangsa atau masyarakat Indonesia untuk turut serta mempertahankan eksistensi bangsa dengan meningkatkan kualitas kehidupan bangsa. Pada aspek peningkatan pengetahuan, seseorang atau individu perlu menyadari sebagai bagian dari keseluruhan bangsa untuk mengetahui dan menyadari tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa, dan potensi yang dimiliki bangsa. Oleh karena itu, upaya pembinaan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda pada masa sekarang selayaknya mengutamakan pandangan dan sikap antisipatoris, berupa pembinaan kemampuan memperhitungkan perkembangan yang akan terjadi di masa depan. Artinya, dibutuhkan penanaman sikap untuk siap menghadapi segala situasi baru, tantangan baru, yang belum pernah terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat atau suatu bangsa.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam pengembangan kepribadian generasi muda, Mahpudz (2013) mengemukakan bahwa dalam internasialisasi Nilai Pancasila dan pembudayaan nilai Pancasila agar dapat menjadi wahana strategis bagi peningkatan kompetensi generasi muda, maka setidaknya perlu dilakukan beberapa alternatif perbaikan pembelajaran, di antaranya; Pertama, dalam perspektif pengorganisasian materi pendidikan, selayaknya materi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara disusun berdasarkan asas kontinuitas, urutan dan integrasi. Asas kontinuitas (continuity) diartikan sebagai adanya kesinambungan secara vertikal dari suatu materi ke materi selanjutnya sehingga generasi muda memiliki kesempatan luas untuk belajar dengan baik dan benar dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kependidikan. Asas urutan (sequence) dapat diartikan sebagai adanya keterkaitan antara satu materi dengan materi lainnya, sehingga materi pendidikan tersebut terlihat keterhubungannya (dalam perspektif proses pembelajaran). Sedangkan asas integrasi (integration) dapat diartikan sebagai adanya kaitan dan hubungan antara dan antar materi pendidikan satu dengan lainnya sebagai bagian keseluruhan materi pembelajaran; Kedua, dibutuhkan komitmen dan rekrutmen pendidik dalam rangka Revitalisasi nilai-nilai Pancasila di era kini dan masa depan yang mendasarkan pada standar yang disepakati. Selain itu agar dapat berlangsung pertukaran informasi berkenaan dengan perkembangan model, pola, strategi pembelajaran di tiap lingkup

dan juga jenjang pendidikan sesuai dinamika sosial; Ketiga, penyelenggaraan pembelajaran nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Negara sebaiknya dibuatkan dalam format, model pembelajaran yang terbuka dan memberi peluang bagi generasi muda untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat, berdiskusi secara intensif untuk pendalaman materi yang dikaji. Dapat dilihat dari pelaksanaan seperti demikian, jumlah peserta yang secara penuh mengikuti kegiatan, antusiasme peserta dalam pengembangan materi untuk dapat diterapkan sekaligus; Keempat, Semakin penting untuk terus ditumbuhkembangkan kesadaran kebangsaan Indonesia di masa kini dalam wujud pendidikan antisipatoris. Pendidikan yang tidak sekedar mentransformasikan pengetahuan, tetapi juga memberikan pemahaman wawasan kebangsaan, wawasan kebhinekaan dimiliki bangsa Indonesia sebagai suatu potensi yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai perwujudan nyata nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kebenarannya tetap diyakini oleh bangsa Indonesia, karena mampu mengimbangi dinamika dan dialektika jaman. Saran, agar kita selalu memperdalam dan menggali makna dan arti Pancasila dalam teori dan praktik dalam kehidupan sehari-hari; agar generasi “muda” tetap memberikan sosialisasi dan keteladanan kepada generasi “milenium” tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat; dan memanfaatkan kemajuan iptek dalam mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Alfian. (1981). Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Aris Shofa, Abd Mu'id. (2016). Memaknai Kembali Multikulturalisme Indonesia Dalam Bingkai.
- Budiardjo, Miriam. (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Firdaus, U. U. C., & Ahadah, A. M. (2022). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembentuk Karakter Bangsa Di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya Tahun 2021. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 107-116. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/article/view/6912>
- Ibrahim, Anis. (2010). Perspektif Futuristik Pancasila Sebagai Asas/Ideologi Dalam UU Keormasan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 2, November 2010.
- Latif, Yudi. (2011). Revitalisasi Pancasila di Tengah Dua Fundamentalisme dalam DISKURSUS, dalam *DIGNITAS* Volume VII Nomor 2 Tahun 2011.
- Pancasila, JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016.

- Rafiki, R., & Dewi, D. A. (2022). Gerakan muda berkarakter Pancasila di era digital. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 83-90. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/article/view/6910>
- Suhartono, S., Arsana, I. W., Widyatama, P. R., & Fauzi, A. (2024). Analisis penerapan kurikulum merdeka dalam pembelajaran pendidikan Pancasila SMA Negeri 17 Surabaya. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 10(1), 1-10. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/1634>
- Widyatama, P. R. (2023). Penanaman nilai karakter cinta tanah air pada siswa di SMP PGRI 1 Buduran. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (EMBISS)*, 3(2), 174-187. <https://embiss.com/index.php/embiss/article/view/213>
- Zaman, A. Q., Irnawati, I., & Widyatama, P. R. (2023). PPKn teachers' efforts in understanding students through the merdeka belajar curriculum. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 8(4), 459-468. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jed/article/view/13077>